



Bandung, 30 April 2025

Nomor : 077/BPR-CDR/Perbarindo/IV/2025
Lampiran : 1 (satu) Bundel

Kepada Yth,

1. DPP PERBARINDO / PERBARINDO PUSAT
 2. PIMPINAN REDAKSI MAJALAH MEDIA BPR
- Komplek Patra II No.46
Jl. Jenderal Ahmad Yani Bypass Cempaka Putih
JAKARTA PUSAT

Dengan hormat,

Perihal : **Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Citradana Rahayu Tahun 2024**

Menunjuk POJK No.9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat & Bank Perekonomian Rakyat Syariah, dan SEOJK No. 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat. Berikut kami sampaikan :

1. Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2024
2. Tanda Terima Bukti Kirim Laporan Melalui Apollo

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. BPR Citradana Rahayu
Direksi,



PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
CITRADANA RAHAYU

Pipi Sopiawati
Direktur Utama

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN
TATA KELOLA BPR
TAHUN 2024
PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
“CITRADANA RAHAYU”
B A N D U N G

**LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT. BPR CITRADANA RAHAYU
PERIODE DESEMBER 2024**

A. Ringkasan hasil Penilaian (self Assessment)) Atas Penerapan Tata Kelola

Alamat	Jalan Sunda Nomor 2 A Kota Bandung
Nomor Telepon	022 – 7314945
Penjelasan Umum	Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2024
Peringkat Komposit Hasil penilaian Sendiri (self Assessment Tata Kelola)	1 (sangat baik)
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil penilaian sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	Manajemen BPR sudah melakukan penerapan tata kelola dengan sangat baik, dan akan tetap berkomitmen menjaga penerapan tata kelola secara konsisten.

B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	Nama : Sriningsih Surja
	NIK*) : -
	Jabatan : Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab: ✓ Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan BPR dan BPR Syariah untuk kepentingan BPR dan BPR Syariah sesuai dengan maksud dan tujuan BPR dan BPR Syariah yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS. ✓ Direksi wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati hatian ✓ Direksi berwenang mewakili BPR dan BPR Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS. ✓ Direksi menerapkan Tata Kelola yang Baik pada BPR dan BPR Syariah, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi. ✓ Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR dan BPR Syariah dan auditor ekstern dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain.



	✓ Direksi wajib menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai. ✓ Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. ✓ Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan BPR dan BPR Syariah yang bersifat strategis yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai. ✓ Direksi wajib menyediakan data dan informasi terkait BPR dan BPR Syariah yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ✓ Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi. ✓ Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan dalam rapat Direksi dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. ✓ Direksi wajib menuangkan hasil rapat Direksi dalam risalah rapat dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris : ✓ Melakukan Penurunan NPL dengan cara : Penagihan kredit kolektibilitas, DPK, KL, Diragukan & Macet ✓ Telah dilakukan Penghapusan Kredit Macet tahun 2024 ✓ Persetujuan RBB tahun 2025 ✓ Segera dilakukan pemenuhan untuk jumlah Direksi dan Komisaris

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**) Termasuk tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Komisaris yang belum dilaporkan dalam laporan penerapan Tata Kelola tahun sebelumnya.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	
1.	Nama	: Alexander Tjandana MK
	NIK*)	: -
	Jabatan	: Komisaris



Tugas dan Tanggung Jawab:

- ✓ Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dan BPR Syariah dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS
- ✓ Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR dan BPR Syariah.
- ✓ Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR dan BPR Syariah, kecuali terkait dengan :
 - a. penyediaan dana atau penyaluran dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perkreditan rakyat dan batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah; dan
 - b. hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ✓ Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR dan BPR Syariah.
- ✓ Dewan Komisaris wajib mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.
- ✓ Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap :
 - a. pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR dan BPR Syariah; dan
 - b. penerapan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.
- ✓ Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas:
 - a. temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR dan BPR Syariah, auditor ekstern; dan
 - b. hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain.

Rekomendasi kepada Direksi :

- ✓ Penurunan NPL & Penghapusan kredit macet tahun 2024.
- ✓ Persetujuan RBB tahun 2025
- ✓ Segera dilakukan pemenuhan Direksi dan Komisaris

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.



3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

Saat ini belum memiliki komite – komite

- a. Tugas dan Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite :

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab:
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
4.	Komite Manajemen Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
5.	Komite Lainnya
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :



b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	NIK	Nama	Keahlian	Komite					Independen (Ya/Tidak)
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Komite Lainnya	
1.									
2.									
dst									

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pada kelompok Usaha BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi Pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK*)	Nama Anggota Direksi	Nama kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan Tahun sebelumnya (%)
1.		Sriningsih surja	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan Tahun sebelumnya (%)
1.		Alexander Tjandana MK	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

3. Kepemilikan Saham Pemegang Saham Pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK*)	Nama Pemegang Saham	Nama kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan Tahun Sebelumnya (%)
1.		Senfry Limanjaya	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.		Rinny Limanjaya, Lin	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.		Anne Limanjaya	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.



D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Pada Perusahaan Lain.**1. Kepemilikan saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain**

No.	NIK*)	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.		Sriningsih surja	Tidak ada	PT Surya Harum Sakti	45%

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.		Alexander Tjandana MK	Tidak ada	1. PT Alam Indah Kurnia Abadi 2. PT. Tiara Alam Abadi	16,66 % 5%

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

E. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pada BPR**1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi Pada BPR**

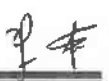
No.	NIK*)	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.		Sriningsih Surja	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris Pada BPR

No.	NIK*)	Nama Anggota Komisaris	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.		Alexander Tjandana MK	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.



3. Hubungan Keuangan Pemegang Saham Pada BPR

No.	NIK*)	Nama Pemegang Saham	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.		Senfry Limanjaya	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.		Rinny Limanjaya, Lin	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.		Anne Limanjaya	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

F. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pada BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK*)	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.		Sriningsih Surja	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Pada BPR

No.	NIK*)	Nama Anggota Komisaris	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.		Alexander Tjandana MK	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

3. Hubungan Keluarga Pemegang Saham Pada BPR

No.	NIK*)	Nama Pemegang Saham	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.		Senfry Limanjaya	Tidak ada	Tidak ada	Adik Kandung dari Rinny Limanjaya Lin dan Anne Limanjaya
2.		Rinny Limanjaya, Lin	Tidak ada	Tidak ada	Kakak Kandung dari Senfry Limanjaya dan Anne Limanjaya
3.		Anne Limanjaya	Tidak ada	Tidak ada	Adik Kandung dari

					Rinny Limanjaya dan Kakak Kandung Dari Senfry Limanjaya
--	--	--	--	--	--

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

G. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji*)	1	Rp. 264.000.000,-	1	Rp. 144.000.000,-
2.	Tunjangan				
3.	Tantiem				
4.	Kompensasi berbasis saham				
5.	Remunerasi lainnya**)	1	Rp. 18.000.000,-		
Total Remunerasi			Rp. 282.000.000,-		Rp. 144.000.000,-
Jenis Fasilitas Lain					
1.	Perumahan	1	Rp. 24.000.000,-		
2.	Transportasi				
3.	Asuransi Kesehatan	1	Rp. 5.760.000,-	1	Rp. 5.760.000,-
4.	Fasilitas Lainnya				
	Total fasilitas Lainnya		Rp. 29.760.000,-		Rp. 5.760.000,-
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain			Rp. 311.760.000,-		Rp. 149.760.000,-

*) Gaji merupakan gaji pokok, tidak termasuk tunjangan yang diterima Direksi dan Dewan Komisaris serta keluarga.

*) fasilitas lainnya dapat dirinci dan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing BPR, misalnya fasilitas komunikasi.

**) Remunerasi lainnya bagi pengurus BPR dan ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan*)	Perbandingan**)
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3,00
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,00
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,00
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,83
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3,05

*) Gaji yang dimaksud adalah mencakup gaji pokok yang diterima dalam 1 (satu) tahun.

**) Contoh perhitungan perbandingan rasio gaji

Gaji pegawai yang tertinggi = Rp 200.000.000,00, Gaji pegawai yang terendah = Rp 50.000.000,00

Rasio Gaji Pegawai yang tertinggi dengan terendah

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Gaji Pegawai yang tertinggi}}{\text{Gaji Pegawai yang terendah}} : \frac{\text{Gaji Pegawai yang terendah}}{\text{Gaji Pegawai yang terendah}} \\
 & = \frac{\text{Rp 200.000.000,00}}{\text{Rp 50.000.000,00}} : \frac{\text{Rp 50.000.000,00}}{\text{Rp 50.000.000,00}} \\
 & = 4:1
 \end{aligned}$$

***) Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan gaji pegawai yang terendah dilaporkan dalam pecahan terkecil.

I. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) Tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	09 Januari 2024	5 Orang	- Laporan Kinerja Tahun 2023 - Strategi pelaksanaan bisnis tahun 2024 - Kenaikan gaji tahun 2024
2.	03 April 2024	5 Orang	- Hasil exit meeting /pemeriksaan OJK tahun 2024 - NPL (non performing loan) - Manajemen Risiko (profil risiko) - Perhitungan CKPN - Rencana pembagian deviden tahun buku 2023
3.	19 Agustus 2024	5 Orang	- Perhitungan CKPN yang mempengaruhi BMPK - Rencana penutupan kantor kas Lembang - Rencana pembukaan kantor cabang Majalaya

			- Pembahasan laporan kinerja tahun 2024 - Pembahasan efisiensi tenaga kerja
4.	02 Desember 2024	3 Orang	- Rencana penunjukan KAP tahun buku 2024 - Rencana perubahan pengurus (Komisaris dan Direksi) - Pembahasan RBB tahun 2025

J. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran **) (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.		Alexander Tjandana MK	4	-	100%

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**) Tingkat Kehadiran = $\frac{\text{Frekuensi Kehadiran Fisik} + \text{frekuensi Kehadiran Telekonferensi}}{\text{Jumlah Rapat Keseluruhan}} \times 100\%$

K. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelum-nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum-nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum-nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum-nya	Tahun Laporan
Total <i>Fraud</i>	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah Diselesaikan								
Dalam Proses Penyelesaian**)								
Belum Diupayakan Penyelesaiannya***)								
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum								

*) BPR harus menjelaskan lebih lanjut mengenai upaya penyelesaian penyimpangan internal oleh BPR. Dalam hal terdapat penyimpangan internal yang belum diupayakan penyelesaiannya, dapat dijelaskan upaya penelitian yang telah dilakukan.

**) Termasuk penyimpangan internal yang belum diselesaikan sebelumnya sampai dengan tahun laporan.

***) Merupakan penyimpangan internal yang masih dalam proses penelitian.

L. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	Tidak ada	Tidak ada
Dalam Proses Penyelesaian	Tidak ada	Tidak ada
Total		

M. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan **)
	NIK*)	Nama	Jabatan	NIK*)	Nama	Jabatan			
1.		Senfry Limanjaya	Pemegang Saham		Liem Budi Liman Abadi Darmin	Direktur Utama	Sewa Gedung Jw : 5 th (2020 – 2025)	530 juta Per tahun	Bandung
2.		Senfry Limanjaya	Pemegang Saham		Liem Budi Liman Abadi Darmin	Direktur Utama	Sewa Gedung Jw : 5 th (2020 - 2025)	215 juta Per tahun	Garut

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

N. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	04 Maret 2024	Sosial	Sumbangan kegiatan ramadhan	DKM Mesjid Jami Nurul Ikhlas (Jalan Karapitan Gg Uni)	Rp. 100.000,-
2.	18 Maret 2024	Sosial	Sumbangan yayasan penderita cacat bhakti guna	Yayasan Penderita Cacat Bhakti Guna (YPCBG) Kab. Bandung	Rp. 100.000,-
3.	05 April 2024	Sosial	Sumbangan bakti sosial himbauan lingkungan	Gerakan Indonesia Bersatu	Rp. 50.000,-
4.	19 April 2024	Sosial	Kegiatan silaturahmi dan berbagi bersama anak yatim	Perbarindo	Rp. 500.000,-
5.	27 September 2024	Sosial	Sumbangan maulid nabi	Panitia Pembangunan Mesjid Banutamim	Rp. 100.000,-

PT BPR Citradana Rahayu

6.	20 November 2024	Sosial	Sumbangan rakor pemuda pancasila	Cabang Sumedang	Rp. 50.000,-
----	---------------------	--------	-------------------------------------	-----------------	--------------

Demikian laporan ini kami sampaikan, terima kasih

Bandung, 25 April 2025

PT BPR CITRADANA RAHAYU



Pipi Sopiawati
Direktur Utama



Senfry Limanjaya
Komisaris Utama

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT Bank Perekonomian Rakyat Citradana Rahayu

Pelaporan

Laporan Tahunan Bank Perekonomian Rakyat

Nomor Referensi

933741-3-LTBPRK-R-A-20241231-010201-602000-02052025082852

Periode Data

2024

User ID Petugas Pelaporan

sriningsih.surja@bprcitradana.co.id

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

29 / 29

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2025-05-02 08:28:52



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.